



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI  
B I D A N G  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,  
INVESTASI, DAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

---

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persicangan	: II
Rapat ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 11 Februari 2010
W a k t u	: Pukul 19.00 s/d 23.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
A c a r a	: Penjelasan Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI.
Ketua Rapat	: Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA didampingi Wakil Ketua (Aria Bima dan Ir. Nurdin Tampubolon).
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI)
Hadir	: A. 44 dari 52 orang Anggota B. Gubernur Propinsi DKI Jakaarta, Walikota Jakarta Utara, Dinas Koperasi dan UKM beserta jajaran.

**KESIMPULAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Gubernur Propinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara, Dinas Koperasi dan UKM dibuka pada pukul 19.45 WIB setelah korum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata tertib DPR RI dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa Rapat Dengar Pendapat kali ini agenda utamanya adalah pembahasan terkait dengan Sentra Usaha Kecil Permai Koja Jakarta Utara dan merupakan tindak lanjut dari Kunjungan Lapangan Komisi VI DPR RI ke Pasar Koja Jakarta Utara pada tanggal 27 Januari 2010.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang terhormat Anggota Komisi VI DPR RI untuk menanggapi atas penyampaian penjelasan Gubernur Propinsi DKI Jakarta.

## II. KESIMPULAN

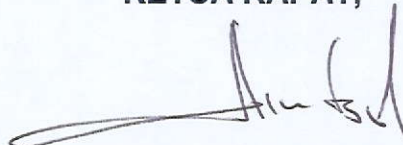
1. Program revitalisasi pasar tradisional merupakan program Pemerintah dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sejalan hal tersebut, maka Komisi VI DPR RI mendesak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperhatikan pedagang lama dan melakukan evaluasi hasil program revitalisasi pasar yang telah dilakukan.
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendataan ulang jumlah pasar dan pedagang, baik pedagang formal maupun informal, agar dapat diketahui kondisi terkini potensi ekonominya sehingga dapat disiapkan strategi pembinaannya. Selanjutnya, Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendekatan persuasif dalam melakukan relokasi pedagang-pedagang tradisional.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penataan ulang lapak-lapak/kios di lokasi binaan Blok B dan C serta Pasar Sindang dan Pasar Rawa Badak Kecamatan Koja seperti tata letak lapak, sarana-prasarana, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, aman, bersih, nyaman.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar segera menyelesaikan pembangunan di lokasi binaan Blok B dan C serta Pasar Sindang dan Pasar Rawa Badak Kecamatan Koja untuk kepentingan relokasi pedagang lama eks lorong 104 Kecamatan Koja.
5. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan mekanisme perizinan pendirian/pembangunan pasar modern sehingga tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih memperketat mekanisme pengawasannya sehingga tidak mengancam eksistensi pedagang tradisional.

## III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat ditutup pada pukul 23.05 WIB.

Jakarta, 11 Februari 2010

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**



**IR.H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA**  
No. A-212